

ANALISIS PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN HARGA KESEIMBANGAN BERAS DI INDONESIA TAHUN 2020–2024

Rimma Damayanti Br Malau¹, Tazliyah², Christianto Ginting³, Fitrawaty⁴
rimmadamayanti2103@gmail.com¹, ttazliyah@gmail.com², christiantoginting140@gmail.com³,
fitrawaty@unimed.ac.id⁴
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan beras di Indonesia selama periode 2020–2024 dalam kerangka teori ekonomi mikro. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Variabel yang dianalisis meliputi harga beras eceran rata-rata nasional, Upah Minimum Provinsi (UMP), konsumsi beras nasional, dan produksi beras nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras mengalami kenaikan kumulatif sebesar 42,86 persen, dari Rp10.500 per kilogram pada tahun 2020 menjadi Rp15.000 per kilogram pada tahun 2024. Kenaikan ini dipicu oleh pergeseran kurva permintaan ke kanan akibat pertumbuhan penduduk dan kenaikan UMP, serta pergeseran kurva penawaran ke kiri akibat fenomena El Niño tahun 2023, lonjakan biaya produksi pertanian, dan alih fungsi lahan sawah. Kondisi pasar mengalami transisi struktural dari surplus (2020–2022) menjadi defisit (2024), dengan selisih antara produksi dan konsumsi yang semakin menyempit. Meskipun UMP meningkat secara nominal sebesar 16,50 persen, laju kenaikan tersebut jauh tertinggal dari kenaikan harga beras, sehingga terjadi erosi daya beli riil masyarakat pekerja. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas produksi padi, diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, penguatan sistem cadangan dan distribusi pangan, serta perluasan jaring pengaman sosial pangan bagi kelompok masyarakat rentan.

Kata Kunci: Permintaan Beras, Penawaran Beras, Harga Keseimbangan, Upah Minimum Provinsi, Ketahanan Pangan, El Niño, Ekonomi Mikro.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of demand, supply, and equilibrium price of rice in Indonesia during the period 2020–2024 within the framework of microeconomic theory. A descriptive-quantitative method was employed using secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Manpower, and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The variables analyzed include the national average retail price of rice, the Provincial Minimum Wage (UMP), national rice consumption, and national rice production. The findings reveal that rice prices rose cumulatively by 42.86 percent, from IDR 10,500 per kilogram in 2020 to IDR 15,000 per kilogram in 2024. This increase was driven by a rightward shift of the demand curve due to population growth and rising UMP, alongside a leftward shift of the supply curve attributable to the 2023 El Niño phenomenon, surging agricultural production costs, and the conversion of productive paddy fields. The market underwent a structural transition from surplus conditions (2020–2022) to a deficit (2024), with the gap between production and consumption narrowing significantly. Although UMP increased nominally by 16.50 percent, this rate lagged far behind rice price inflation, resulting in a real erosion of workers' purchasing power. The study recommends strengthening paddy production capacity, promoting local food diversification, improving the national food reserve and distribution system, and expanding social safety net programs for vulnerable households.

Keywords: Rice Demand, Rice Supply, Equilibrium Price, Provincial Minimum Wage, Food Security, El Niño, Microeconomics.

PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem ketahanan pangan nasional Indonesia. Sebagai bahan makanan pokok bagi lebih dari 270 juta penduduk, beras tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan politik yang mendalam. Stabilitas harga beras secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengalokasikan proporsi signifikan dari pengeluaran konsumsinya untuk kebutuhan pangan pokok ini.

Dalam perspektif ilmu ekonomi mikro, mekanisme pembentukan harga suatu komoditas ditentukan oleh interaksi antara kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply) di pasar. Harga keseimbangan (equilibrium price) terbentuk ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu titik tertentu. Perubahan pada salah satu atau kedua sisi pasar tersebut akan menggeser titik keseimbangan dan mengubah harga serta kuantitas yang diperdagangkan di pasar. Pemahaman yang komprehensif tentang dinamika pasar beras menjadi sangat relevan mengingat perannya yang vital dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), harga beras eceran rata-rata nasional mengalami kenaikan yang signifikan dan konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Harga yang semula berada pada kisaran Rp 10.500 per kilogram pada tahun 2020 melonjak menjadi Rp 15.000 per kilogram pada tahun 2024, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 42,86 persen dalam rentang waktu lima tahun. Kenaikan yang paling drastis terjadi pada periode 2022–2023, ketika harga melonjak sekitar 15,79 persen dalam satu tahun, dan diikuti oleh kenaikan 13,64 persen pada periode 2023–2024. Pola kenaikan harga yang tajam dan berkelanjutan ini sangat berbeda dari tren harga beras dalam dekade-dekade sebelumnya dan mencerminkan adanya tekanan struktural yang serius pada pasar beras nasional.

Kenaikan harga beras yang signifikan ini dipicu oleh konvergensi berbagai faktor yang mempengaruhi sisi penawaran maupun permintaan secara bersamaan. Dari sisi penawaran, fenomena El Niño yang terjadi pada tahun 2023 menyebabkan kekeringan berkepanjangan di berbagai sentra produksi padi utama Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kondisi ini mengakibatkan penurunan luas panen dan produktivitas padi secara signifikan. Selain itu, kenaikan biaya produksi pertanian akibat lonjakan harga pupuk dan pestisida yang dipicu oleh disrupsi rantai pasok global pasca pandemi COVID-19 dan dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina turut memperlemah kapasitas produksi petani. Konversi lahan sawah produktif menjadi kawasan permukiman dan industri yang terus berlangsung juga mempersempit basis produksi padi nasional secara struktural dan jangka panjang.

Di sisi permintaan, konsumsi beras nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang rata-rata bertambah sekitar 2,8 juta jiwa per tahun. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terjadi setiap tahun, dari rata-rata Rp 2.672.371 pada tahun 2020 menjadi Rp 3.113.359 pada tahun 2024, secara teoritis meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan konsumsi beras. Walaupun demikian, laju kenaikan UMP yang lebih lambat dibandingkan laju kenaikan harga beras mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli riil masyarakat terhadap komoditas pangan pokok ini, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Implikasi kenaikan harga beras yang berkepanjangan sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan, yang mengalokasikan proporsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Fenomena ini tidak hanya berpotensi memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi juga dapat mengancam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan stabilisasi harga beras yang efektif dan tepat sasaran, oleh karena itu, merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda kebijakan pangan dan kesejahteraan sosial pemerintah Indonesia.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara mendalam dinamika permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan beras di Indonesia selama periode 2020–2024 dengan menggunakan kerangka teori ekonomi mikro. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme pembentukan harga beras di pasar domestik, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan pasar, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis perkembangan suatu fenomena berdasarkan data numerik yang terukur secara sistematis. Penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis kausalitas yang kompleks melalui manipulasi variabel, melainkan bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat, komprehensif, dan objektif tentang kondisi atau perkembangan suatu fenomena pada periode waktu tertentu (Sugiyono, 2019).

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan melalui penggunaan data numerik yang bersumber dari lembaga-lembaga statistik dan pemerintah yang kredibel, serta analisis yang dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif dan grafis. Data-data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel perkembangan, grafik tren, dan visualisasi kurva permintaan-penawaran yang mencerminkan kondisi empiris pasar beras Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Perkembangan Harga Beras, UMP, Konsumsi, dan Produksi Beras

Tabel 1 menyajikan ringkasan data komprehensif tentang perkembangan empat variabel utama penelitian, yaitu harga beras eceran rata-rata nasional, UMP rata-rata nasional, konsumsi (permintaan) beras nasional, dan produksi (penawaran) beras nasional selama periode 2020–2024. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Harga Beras, UMP, Konsumsi, dan Penawaran Beras Nasional 2020–2024

Tahun	Harga Beras Eceran (Rp/kg)	UMP Rata-rata Nasional (Rp/bulan)	Konsumsi Beras Nasional (Juta Ton)	Produksi/Penawaran Beras (Juta Ton)
2020	Rp 10.500	Rp 2.672.371	29,57	31,33
2021	Rp 11.000	Rp 2.687.723	30,05	31,36
2022	Rp 11.400	Rp 2.729.436	30,20	31,54
2023	Rp 13.200	Rp 2.923.309	30,64	30,90
2024	Rp 15.000	Rp 3.113.359	31,12	30,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian (2024), diolah.

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat beberapa temuan empiris yang penting untuk dicermati secara mendalam. Pertama, harga beras eceran nasional mengalami kenaikan yang konsisten dan akseleratif selama seluruh periode penelitian, dengan laju kenaikan yang semakin meningkat pada dua tahun terakhir. Kenaikan harga dari Rp 10.500 menjadi Rp 11.000 per kilogram pada 2020–2021 sebesar 4,76 persen merupakan kenaikan yang relatif moderat dan masih berada dalam rentang normal. Namun, akselerasi kenaikan terjadi signifikan pada periode 2022–2023 (+15,79%) dan 2023–2024 (+13,64%), yang menunjukkan adanya gangguan struktural yang serius pada keseimbangan pasar beras nasional.

Kedua, perkembangan UMP rata-rata nasional menunjukkan tren peningkatan yang stabil, namun dengan laju yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan laju kenaikan harga beras, terutama sejak tahun 2023. Pada tahun 2020–2021, kenaikan UMP hanya sebesar 0,58 persen, jauh di bawah kenaikan harga beras 4,76 persen. Disparitas ini semakin melebar pada tahun 2023–2024, di mana kenaikan UMP sebesar 6,50 persen masih jauh tertinggal dari kenaikan harga beras sebesar 13,64 persen. Kondisi ini secara empiris mengkonfirmasi terjadinya erosi daya beli riil masyarakat pekerja terhadap komoditas beras.

Ketiga, dari sisi konsumsi, terdapat tren kenaikan yang gradual namun konsisten dari 29,57 juta ton pada 2020 menjadi 31,12 juta ton pada 2024, yang mencerminkan peningkatan permintaan agregat seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan nominal. Sementara itu, produksi beras menunjukkan pola yang berbeda: mengalami peningkatan moderat dari 31,33 juta ton (2020) ke 31,54 juta ton (2022), kemudian berbalik arah dan mengalami penurunan signifikan menjadi 30,90 juta ton (2023) dan 30,34 juta ton (2024). Pola divergen antara konsumsi yang terus meningkat dan produksi yang menurun inilah yang menjadi sumber tekanan utama terhadap kenaikan harga keseimbangan beras.

2. Analisis Kondisi Pasar: Permintaan, Penawaran, dan Harga Keseimbangan

Tabel 2 menyajikan analisis kondisi keseimbangan pasar beras Indonesia pada setiap tahun dalam periode penelitian, berdasarkan perbandingan antara volume permintaan (konsumsi) dan volume penawaran (produksi) beras nasional.

Tabel 2. Analisis Kondisi Keseimbangan Pasar Beras Indonesia 2020–2024

Tahun	Harga Beras (Rp/kg)	Permintaan (Juta Ton)	Penawaran (Juta Ton)	Kondisi Pasar
2020	Rp 10.500	29,57	31,33	Surplus (penawaran > permintaan)
2021	Rp 11.000	30,05	31,36	Surplus (penawaran > permintaan)
2022	Rp 11.400	30,20	31,54	Surplus (penawaran > permintaan)
2023	Rp 13.200	30,64	30,90	Mendekati keseimbangan
2024	Rp 15.000	31,12	30,34	Defisit (permintaan > penawaran)

Sumber: BPS dan Kementerian Pertanian RI (2024), diolah.

Tabel 2 mengungkapkan perubahan yang sangat mendasar dalam kondisi keseimbangan pasar beras Indonesia selama periode penelitian. Pada tahun 2020 hingga 2022, pasar beras nasional berada dalam kondisi surplus, di mana volume produksi (penawaran) secara konsisten melebihi volume konsumsi (permintaan). Besaran surplus bervariasi dari 1,76 juta ton (2020) hingga 1,34 juta ton (2022), yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk membangun cadangan beras nasional dan menjaga stabilitas harga. Dalam kondisi surplus seperti ini, tekanan harga yang terjadi umumnya masih berada dalam batas yang wajar.

Perubahan mendasar terjadi pada tahun 2023, ketika gap antara produksi dan konsumsi menyempit secara drastis menjadi hanya 0,26 juta ton, yang berarti pasar beras hampir tidak memiliki cadangan buffer yang memadai untuk mengantisipasi guncangan (shock) dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi yang mendekati keseimbangan ini menyebabkan pasar menjadi sangat sensitif terhadap perubahan pada salah satu sisi, sehingga gangguan sekecil apapun dapat menimbulkan lonjakan harga yang signifikan.

Pada tahun 2024, kondisi pasar berbalik menjadi defisit untuk pertama kalinya dalam periode penelitian, dengan permintaan melampaui penawaran sebesar 0,78 juta ton. Kondisi defisit ini merupakan konfirmasi empiris dari pergeseran struktural dalam pasar beras nasional, yang tidak lagi mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi domestik dari produksi dalam negeri saja. Defisit inilah yang menjadi pendorong utama lonjakan harga beras ke level tertinggi dalam satu dekade, dan menjelaskan mengapa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pada periode tersebut menjadi tidak terhindarkan meskipun menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Pembahasan: Faktor Penyebab Pergerakan Permintaan, Penawaran, dan Harga Keseimbangan

1. Faktor Penyebab Meningkatnya Permintaan (Kurva Permintaan Bergeser ke Kanan)

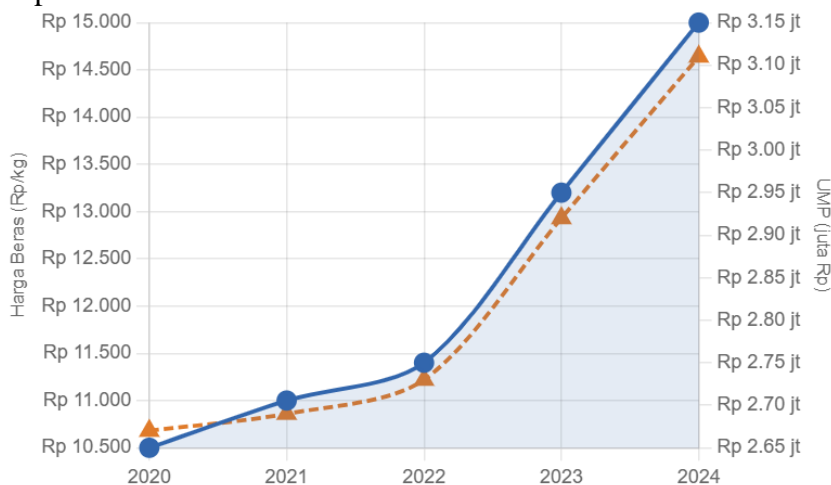
Permintaan beras nasional mengalami peningkatan yang konsisten dari 29,57 juta ton pada tahun 2020 menjadi 31,12 juta ton pada tahun 2024, yang berarti terjadi pertumbuhan kumulatif sebesar 5,24 persen selama lima tahun. Peningkatan ini secara grafis ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan (D) ke kanan, yang berarti bahwa pada setiap tingkat harga beras, jumlah beras yang diminta secara agregat menjadi lebih besar. Terdapat

beberapa faktor utama yang mendorong pergeseran kurva permintaan ke kanan ini.

Pertama, pertumbuhan penduduk merupakan faktor demografis yang paling fundamental dalam mendorong peningkatan permintaan beras. Indonesia mengalami penambahan penduduk rata-rata sekitar 2,8 juta jiwa per tahun selama periode penelitian, yang secara langsung meningkatkan total kebutuhan beras nasional tanpa bergantung pada perubahan harga atau pendapatan per kapita. Pertambahan penduduk ini berarti semakin banyak individu yang membutuhkan beras sebagai bahan pangan pokok setiap harinya.

Kedua, kenaikan UMP rata-rata nasional dari Rp 2.672.371 (2020) menjadi Rp 3.113.359 (2024) secara teoritis meningkatkan daya beli nominal kelompok pekerja berpenghasilan minimum, yang pada gilirannya mendorong peningkatan konsumsi beras per kapita. Dalam kerangka teori permintaan, beras merupakan barang normal yang memiliki elastisitas pendapatan positif, artinya kenaikan pendapatan akan mendorong peningkatan kuantitas beras yang diminta. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kenaikan UMP yang lebih lambat dari kenaikan harga beras mengindikasikan bahwa efek pendapatan riil terhadap permintaan beras sesungguhnya bersifat negatif—konsumen dipaksa mengurangi konsumsi beras untuk menyesuaikan dengan penurunan daya beli riil mereka.

Ketiga, beras merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak memiliki substitusi yang memadai dalam jangka pendek bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di luar wilayah-wilayah yang secara tradisional mengonsumsi pangan non-beras seperti sagu, ubi, atau jagung. Sifat inelastis permintaan beras ini menyebabkan jumlah yang diminta relatif tidak responsif terhadap kenaikan harga, sehingga kurva permintaan cenderung tegak (vertikal) dan pergeserannya ke kanan mencerminkan pertambahan kebutuhan yang bersifat relatif tetap.



2. Faktor Penyebab Menurunnya Penawaran (Kurva Penawaran Bergeser ke Kiri)

Produksi beras nasional mengalami penurunan yang signifikan dari puncaknya sebesar 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 30,34 juta ton pada tahun 2024, yang berarti terjadi penurunan sebesar 3,81 persen dalam dua tahun. Penurunan produksi ini secara grafis ditunjukkan oleh pergeseran kurva penawaran (S) ke kiri, yang berarti bahwa pada setiap tingkat harga beras, jumlah beras yang tersedia di pasar menjadi lebih sedikit. Terdapat beberapa faktor struktural dan situasional yang menjadi penyebab utama pergeseran kurva penawaran ke kiri ini.

Pertama, fenomena El Niño yang terjadi pada tahun 2023 merupakan faktor penyebab paling signifikan dalam jangka pendek. El Niño menyebabkan anomali iklim berupa kekeringan berkepanjangan yang melanda sebagian besar sentra produksi padi utama Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian, sehingga luas tanam padi turun drastis dan luas panen padi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, kenaikan biaya produksi pertanian merupakan faktor yang memiliki dampak jangka menengah terhadap penawaran beras. Harga pupuk, khususnya pupuk urea dan NPK, mengalami lonjakan yang sangat tajam akibat disrupsi rantai pasok global yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina yang melesapkan pasokan gas alam bahan baku utama pembuatan pupuk nitrogen. Kenaikan harga pupuk yang signifikan menyebabkan sebagian petani padi, terutama petani kecil dengan lahan sempit dan modal terbatas, mengurangi penggunaan pupuk bahkan memutuskan untuk tidak menanam padi sama sekali dalam satu musim tanam. Biaya tenaga kerja pertanian yang turut meningkat seiring kenaikan UMP juga menjadi beban tambahan yang mempengaruhi keputusan produksi petani.

Ketiga, alih fungsi lahan (land conversion) merupakan faktor struktural jangka panjang yang terus menggerus kapasitas produksi padi nasional secara permanen. Konversi lahan sawah produktif menjadi kawasan permukiman, industri, infrastruktur, dan peruntukan lain terus berlangsung di berbagai daerah, terutama di Jawa sebagai sentra produksi padi utama. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) melalui berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal.

Keempat, kendala infrastruktur logistik dan distribusi beras antarwilayah turut memperlemah efektivitas penawaran di pasar. Meskipun secara nasional volume produksi beras masih relatif mencukupi pada awal periode penelitian, distribusi yang tidak merata menyebabkan terjadinya kelangkaan lokal di sejumlah daerah konsumsi, sementara daerah produksi mengalami kelebihan pasokan. Inefisiensi logistik ini secara efektif mengurangi penawaran beras yang dapat diakses oleh konsumen pada harga yang terjangkau.

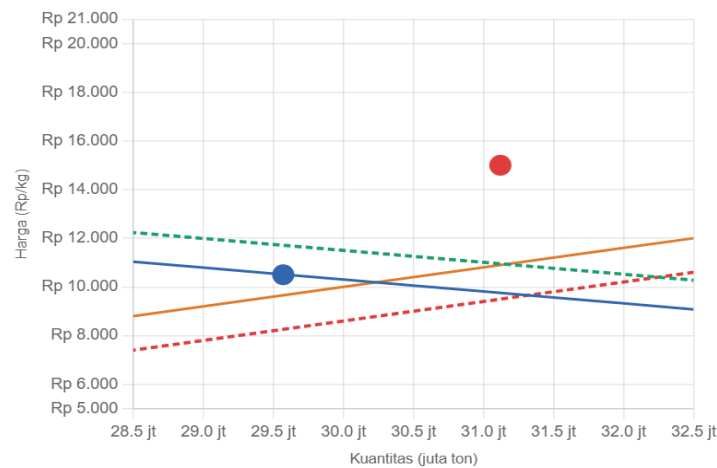
3. Kenaikan Harga Keseimbangan sebagai Resultante Pergeseran Kurva

Kombinasi dari dua pergeseran kurva yang terjadi secara bersamaan—kurva permintaan yang bergeser ke kanan dan kurva penawaran yang bergeser ke kiri—menghasilkan kenaikan harga keseimbangan (equilibrium price) yang signifikan dan berkelanjutan. Dalam representasi grafis, titik keseimbangan (equilibrium point, E) bergeser dari posisi E1 pada tahun 2020 dengan harga Rp 10.500 per kilogram dan kuantitas 29,57–31,33 juta ton, menuju posisi E5 pada tahun 2024 dengan harga Rp 15.000 per kilogram dan kuantitas yang menunjukkan defisit pasar.

Kenaikan harga keseimbangan sebesar 42,86 persen dalam lima tahun ini merupakan respons mekanisme pasar yang bersifat endogen terhadap kondisi fundamental yang berubah. Pasar, melalui sinyal harga yang meningkat, berupaya untuk merangsang peningkatan produksi dari sisi penawaran (dengan memberikan insentif harga yang lebih tinggi kepada petani) dan sekaligus meredam kelebihan permintaan dengan mendorong konsumen untuk menyesuaikan pola konsumsinya. Namun, karena permintaan beras bersifat inelastis, mekanisme penyesuaian ini tidak berjalan efisien dan menimbulkan dampak kesejahteraan yang tidak proporsional bagi konsumen berpenghasilan rendah.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi bukan semata-mata merupakan fenomena siklus biasa yang akan berkoreksi sendiri dalam waktu singkat, melainkan mencerminkan perubahan struktural yang lebih mendalam pada sisi produksi dan konsumsi beras nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, tekanan harga beras kemungkinan akan terus berlanjut atau bahkan meningkat pada periode-periode selanjutnya.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari analisis ini mencakup empat dimensi utama: (1) peningkatan investasi dalam infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi yang tangguh terhadap perubahan iklim, untuk memperkuat ketahanan produksi padi dari ancaman kekeringan; (2) penguatan program subsidi pupuk dan benih unggul yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya produksi petani dan meningkatkan insentif produksi; (3) akselerasi program pencetakan sawah baru di luar Jawa sebagai kompensasi atas alih fungsi lahan yang terus berlangsung; dan (4) pengembangan sistem logistik dan cadangan pangan nasional yang lebih efisien untuk memastikan distribusi beras yang merata dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga beras eceran rata-rata nasional mengalami kenaikan yang signifikan dan akseleratif dari Rp 10.500 per kilogram pada tahun 2020 menjadi Rp 15.000 per kilogram pada tahun 2024, yang merepresentasikan kenaikan kumulatif sebesar 42,86 persen dalam lima tahun. Kenaikan yang paling dramatis terjadi pada periode 2022–2023 sebesar 15,79 persen, yang dipicu oleh dampak gangguan iklim El Niño terhadap produksi padi nasional.
2. UMP rata-rata nasional mengalami peningkatan nominal yang konsisten dari Rp 2.672.371 per bulan (2020) menjadi Rp 3.113.359 per bulan (2024), namun laju kenaikan UMP secara sistematis lebih rendah dibandingkan laju kenaikan harga beras. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya erosi daya beli riil masyarakat pekerja terhadap beras, yang berdampak negatif pada kesejahteraan kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah.
3. Analisis kondisi pasar menunjukkan terjadinya transisi struktural dari kondisi surplus (2020–2022) menuju kondisi mendekati keseimbangan (2023) dan akhirnya menjadi defisit (2024). Perubahan fundamental ini mencerminkan memburuknya keseimbangan antara kapasitas produksi padi yang stagnan-menurun dengan

- kebutuhan konsumsi yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
4. Pergeseran kurva permintaan beras ke kanan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk dan kenaikan UMP, yang terjadi bersamaan dengan pergeseran kurva penawaran beras ke kiri yang disebabkan oleh dampak El Niño, kenaikan biaya produksi, dan alih fungsi lahan sawah, secara gabungan menghasilkan kenaikan harga keseimbangan yang signifikan. Temuan ini mengkonfirmasi ketiga hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
 5. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan ketahanan pangan nasional melalui pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, yang mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan cadangan pangan, guna memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan beras bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan terkait:

1. Penguatan Kapasitas Produksi Padi

Pemerintah perlu melakukan investasi yang lebih besar dan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas produksi padi nasional. Langkah-langkah konkret yang perlu diambil meliputi: (1) rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim; (2) percepatan program cetak sawah baru di luar Pulau Jawa untuk mengimbangi hilangnya lahan sawah akibat alih fungsi; (3) penyediaan subsidi pupuk dan benih unggul yang lebih tepat sasaran dan efisien; serta (4) penerapan teknologi pertanian modern seperti varietas padi tahan kekeringan dan sistem pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

2. Penguatan Sistem Cadangan dan Distribusi Pangan

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG untuk memiliki kemampuan intervensi yang lebih efektif dalam menstabilkan harga beras saat terjadi guncangan pasokan. Pembaruan dan perluasan infrastruktur logistik, termasuk gudang penyimpanan modern yang tersebar di berbagai sentra produksi dan konsumsi, serta peningkatan konektivitas antardaerah melalui pembangunan jalan dan pelabuhan, akan meningkatkan efisiensi distribusi beras nasional secara signifikan.

3. Diversifikasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Program diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal perlu digalakkan secara lebih serius dan sistematis untuk mengurangi ketergantungan konsumsi masyarakat pada beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat. Pengembangan dan promosi komoditas pangan alternatif seperti sorgum, sagu, ubi kayu, singkong, dan jagung yang telah lama menjadi pangan lokal di berbagai daerah perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, mulai dari pengembangan teknologi pengolahan, promosi konsumsi, hingga penguatan rantai nilai produk olahan pangan local.

4. Penguatan Jaring Pengaman Sosial Pangan

Dalam jangka pendek dan menengah, ketika kondisi pasar masih dalam tekanan, pemerintah perlu memperkuat program jaring pengaman sosial pangan untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dampak kenaikan harga beras. Program Bansos Beras, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu ditingkatkan cakupan, kuantitas, dan kualitasnya agar lebih efektif dalam mempertahankan akses pangan yang memadai bagi rumah tangga miskin dan rentan.

5. Peningkatan Kualitas Data dan Pemantauan Pasar

Sistem pemantauan dan peramalan (monitoring and forecasting) harga dan pasokan beras perlu diperkuat agar pemerintah dapat mengambil tindakan antisipatif yang lebih cepat dan tepat sasaran sebelum terjadi lonjakan harga yang merugikan konsumen. Peningkatan kualitas, frekuensi, dan keterbukaan data tentang produksi, konsumsi, stok, dan harga beras di berbagai tingkatan pasar akan memperkuat basis pengambilan keputusan kebijakan pangan yang berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Konsumsi Beras Per Kapita dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Harga Komoditas Pertanian Tahun 2024*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Harga Produsen Beras di Penggilingan 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). *Principles of Economics* (13th ed.). Pearson Education.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2024). *Data Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020–2024*. Jakarta: Satudata Kemnaker. <https://satudata.kemnaker.go.id>
- Kementerian Pertanian RI. (2024). *Statistik Konsumsi Pangan 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. <https://satudata.pertanian.go.id>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics* (9th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Timmer, C. P., Falcon, W. P., & Pearson, S. R. (1983). *Food Policy Analysis*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.